



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.



Di samping itu, Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, 12 Februari 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ibnu Chuldun
NIP 196603281988111001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
F. Pengungkapan Penting Lainnya	61
VI. Lampiran-Lampiran	62



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 12 Februari 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ibnu Chuldun

NIP 196603281988111001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (Bruto) sebesar **Rp.1,106,765,698,761,00** dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Neto) sebesar **Rp.1,106,765,698,761,00** atau mencapai 316% dari estimasi Pendapatan sebesar **Rp.349,966,950,000,00**

Realisasi Belanja Negara (Neto) per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.206,763,278,023,00** atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar **Rp.208,968,207,000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 613,474,741,691,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 49,922,551,773,00**; Aset Tetap (Neto) sebesar **Rp 562,438,187,873,00**; dan Aset Lainnya (Neto) sebesar **Rp 1,087,137,045,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp 13,769,144,457,00** dan **Rp 599,705,597,234,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 1,096,078,214,135,00**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp 326,526,050,172,00** sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai **Rp 769,552,163,963,00**. Surplus dari Kegiatan Non Operasional **Rp 66,764,058,00** sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar **Rp 769,618,928,021,00**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar **Rp 539,069,605,314,00** ditambah Surplus-LO sebesar **Rp 769,618,928,021,00** dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar **Rp 3,906,641,721,00** dikurangi dengan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp 705,076,294,380,00** dan Kenaikan Ekuitas sebesar **Rp 60,635,991,920,00** sehingga Ekuitas entitas per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp 599,705,597,234,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% Thd Angg	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	A.II.				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		349,966,950,000	1,106,765,698,761	316	718,846,619,317
JUMLAH PENDAPATAN		349,966,950,000	1,106,765,698,761	316	718,846,619,317
B. BELANJA NEGARA	B				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.I				
1. Belanja Pegawai	B.I.1.	100,329,469,000	99,596,489,034	99	96,587,760,900
2. Belanja Barang	B.I.2.	95,064,804,000	93,711,441,721	99	100,382,015,994
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.I.3.	13,573,934,000	13,455,347,268	99	6,658,620,118
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.I.4.	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	B.I.5.	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	B.I.6.	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	B.I.7.	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.II.				
1. Transfer ke Daerah	B.II.1.	0	0	0	0
2. Dana Desa	B.II.2.	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	B.II.3.	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		208,968,207,000	206,763,278,023	99	203,628,397,012
JUMLAH BELANJA		208,968,207,000	206,763,278,023	99	203,628,397,012



II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas		0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		2,059,702,694	6,620,985,481
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		71,488,716	0
Piutang Bukan Pajak		6,400,000,000	5,500,000,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(32,000,000)	(27,500,000)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		6,368,000,000	5,472,500,000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		24,000,000	12,320,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		(120,000)	(61,600)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		23,880,000	12,258,400
Persediaan	C.1.	41,399,480,363	28,481,704,376
Persediaan yang Belum Diregister		0	0
JUMLAH ASET LANCAR		49,922,551,773	40,587,448,257
ASET TETAP			
Tanah	C.2.	405,976,599,690	354,884,526,690
Peralatan dan Mesin	C.3.	215,735,943,285	228,199,504,919
Gedung dan Bangunan	C.4.	156,632,478,954	150,979,877,954
Aset Tetap Lainnya		62,460,603	62,460,603
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.5.	(217,027,620,386)	(234,272,437,222)
Aset Tetap yang Belum Diregister		0	0
JUMLAH ASET TETAP		562,438,187,873	499,853,932,944
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR		27,000,000	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		(135,000)	
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TGR (NETTO)		26,865,000	
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		26,865,000	
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.6.	1,877,844,403	2,109,399,883
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		764,166,700	
Aset Lain-lain	C.7.	54,020,755,429	23,477,894,829
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.8.	(55,575,629,487)	(25,389,314,265)
JUMLAH ASET LAINNYA		1,087,137,045	197,980,447
JUMLAH ASET		613,474,741,691	540,639,361,648
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.9.	817,408,157	218,307,283
Utang Yang Belum Ditagihkan		0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.10.	12,951,736,300	1,351,449,051
Uang Muka dari KPPN		0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		13,769,144,457	1,569,756,334
JUMLAH KEWAJIBAN		13,769,144,457	1,569,756,334
EKUITAS			
Ekuitas	C.11.	599,705,597,234	539,069,605,314
JUMLAH EKUITAS		599,705,597,234	539,069,605,314
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		613,474,741,691	540,639,361,648



III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.	1,096,078,214,135	721,684,812,520
JUMLAH PENDAPATAN		1,096,078,214,135	721,684,812,520
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	99,572,777,034	96,419,045,900
Beban Persediaan	D.3.	124,576,226,697	86,850,031,516
Beban Barang dan Jasa	D.4.	66,396,094,788	67,404,422,928
Beban Pemeliharaan	D.5.	13,148,461,680	12,976,032,439
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	9,778,013,733	6,169,493,749
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	13,049,976,240	13,968,528,520
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(4,500,000)	(12,811,600)
JUMLAH BEBAN		326,526,050,172	283,800,366,652
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		769,552,163,963	437,884,445,868
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	20,834,000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	61,922,233	57,728,377
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	15,992,175	23,599,200
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		66,764,058	34,129,177
SURPLUS (DEFISIT) LO		769,618,928,021	437,918,575,045



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	539,069,605,314	528,836,647,014
SURPLUS (DEFISIT) LO	E.2.	769,618,928,021	437,918,575,045
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	(3,906,641,721)	(1,420,402,906)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	5,354,110	25,665
Koreksi atas reklasifikasi		0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2.	(3,875,667,291)	(81,428,571)
Lain-lain		(36,328,540)	(1,339,000,000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(705,076,294,380)	(426,265,213,839)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4.	60,635,991,920	10,232,958,300
EKUITAS AKHIR	E.5.	599,705,597,234	539,069,605,314



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Profil dan Rencana Strategis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

A.2.1. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

a. Visi

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, maka Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah:

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yakni Fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum, dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

b. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



DKI Jakarta sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta maka Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah:

“Melindungi Hak Asasi Manusia”

c. Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Ada pun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah:

“Memberikan Kemudahan Pelayanan Yang Berorientasi Pada Kepuasan Publik Dengan Tetap Terus Melakukan Perbaikan Secara Berkesinambungan Demi Terwujudnya Pelayanan Prima”

*Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui **Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)** berbagai Modul User yang bersifat Online data base mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) baik itu Aplikasi Bendahara Sistem Akuntansi Satker (SAS), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Selain integrasi aplikasi SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru. Proses Bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul. Saat ini terdapat 8 (delapan) modul dalam pelaksanaan anggaran yaitu :

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Aset Tetap;
7. Modul Pelaporan;
8. Modul Administrator



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi tingkat Kementerian, satuan kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan Kementerian adalah Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan BMN.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan ini juga dimonitoring dan evaluasi melalui Sistem **MonSAKTI** yaitu Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tools yang digunakan oleh Pengguna Aplikasi Sakti yang berfungsi untuk **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL SATKER** (Dilakukan oleh Satuan Kerja) **MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER DAN BUN** Terutama dalam menu to do list.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam



penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan pada neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 2
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	



- Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Daftar Transaksi BMN dalam Aplikasi SAKTI Modul Aset
 - Saldo Awal (Kode Transaksi 100)

Menu ini digunakan untuk menginput Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada aplikasi SAKTI Modul Aset baik diperoleh dengan pembelian, hibah, transfer masuk, reklas masuk atau perolehan lainnya yang sah. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber tahun anggaran yang



lalu.

- Pembelian (Kode Transaksi 101)
Menu ini digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh dengan pembelian dari DIPA/APBN pada Tahun Anggaran Berjalan yang tanpa melalui proses Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Pencatatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dilengkapi dengan faktur/nota pembelian barang dengan SPM/SP2D.
- Transfer Masuk (Kode Transaksi 102)
Menu ini digunakan untuk merekam data BMN dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST satker pemberi dan satker penerima BMN, bila transfer dilakukan antar Pengguna Barang (antar Kementerian Negara/Lembaga) maka dibutuhkan dokumen persetujuan alih status untuk melakukan transaksi ini.
- Hibah Masuk (Kode Transaksi 103)
Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan aset yang bersumber dari hibah dan diterima dari pihak ketiga di luar Pemerintah Pusat, misalnya dari pemerintah daerah maupun dari swasta. Pencatatan aset tersebut sebagai BMN dilakukan berdasarkan BAST, tanpa menunggu adanya register dari DJPPR/Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pengesahan ke KPPN (MPHL-BJS).
- Rampasan (Kode Transaksi 104)
Menu ini digunakan untuk menginput transaksi perolehan BMN hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.
- Penyelesaian Pembangunan Langsung (Kode Transaksi 113)
Merupakan transaksi perolehan BMN dari pengadaan pembangunan gedung/bangunan dan BMN lainnya.
- Pembatalan Penghapusan (Kode Transaksi 106)
Menu ini digunakan untuk memunculkan kembali aset tetap/aset lainnya yang sudah dihapuskan disebabkan antara lain berupa temuan oleh APIP dan BPK. Dalam menginput menu transaksi pembatalan penghapusan harus disertai dokumen sumber Berita Acara Pembatalan Penghapusan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi 107)
Menu ini digunakan :
 1. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain (Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub- sub kelompok);



2. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset intrakompabel menjadi aset ekstrakompabel atau sebaliknya.
 - **Pertukaran (Kode Transaksi 111)**

Menu Pertukaran di aplikasi SAKTI digunakan untuk mencatat transaksi pertukaran dengan entitas lain. Menurut PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang di transfer/diserahkan.
 - **Perolehan Lainnya (Kode Transaksi 112)**

Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, yang berasal dari transaksi selain Pembelian, Transfer Masuk, Hibah (Masuk), Rampasan, Penyelesaian Pembangunan, Pembatalan Penghapusan, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, dan Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS. Menu ini juga digunakan di beberapa kementerian yang melakukan pengadaan aset dari dana yang bersumber diluar mekanisme APBN seperti dana samsat pada POLRI.
 - **Pengurangan (Kode Transaksi 201)**

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pengurangan kuantitas volume Barang Milik Negara ketika ada koreksi terhadap nilai fisik Barang Milik Negara, bukan secara nilai asetnya.
 - **Perubahan Kondisi (Kode Transaksi 203)**

Digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kondisi BMN. Perubahan kondisi BMN dilakukan agar terdapat kesesuaian antara pencatatan pada aplikasi SAKTI dengan kondisi fisik BMN yang sebenarnya.
 - **Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (Kode Transaksi 204)**

Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada BMN, baik berupa nilai ataupun kuantitas, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Perubahan dapat dicatat pada saat dasar perubahan/koreksi telah ditetapkan.
 - **Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi (Kode Transaksi 206)**

Menu ini digunakan untuk mencatat penambahan nilai aset yang berasal dari penerimaan aset tetap renovasi.
Aset tetap renovasi adalah renovasi yang dilakukan oleh



- penyewa/peminjam (bukan pemilik) terhadap aset yang disewa/dipinjam. Pada saat masa sewa BMN tersebut berakhir dan diserahkan, tambahan nilai tersebut harus dicatat sebagai penambah nilai aset.
- Pengembangan Langsung (Kode Transaksi 202)
Menu ini digunakan untuk merekam pengembangan atas suatu BMN yang sudah dimiliki (sudah tercatat) sampai dengan tahun anggaran berjalan. Pengembangan BMN yang dimaksud adalah pengembangan yang memenuhi syarat/ketentuan untuk dapat dikapitalisasi dan langsung selesai (tanpa melalui tahapan KDP/termin pembayaran).
 - Pengembangan Dengan KDP (Kode Transaksi 208)
Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi KDP pengembangan Aset yang sudah dimiliki menjadi aset definitifnya.
 - Penghapusan (Kode Transaksi 301)
Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.
 - Transfer Keluar (Kode Transaksi 302)
Menu ini digunakan untuk mencatat penyerahan Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lain dimana UAKPB tersebut masih dalam satu entitas pelaporan akuntansi Pemerintah Pusat. Bukti penyerahan berupa Berita Acara Serah Terima atau dokumen yang dapat dipersamakan.
 - Hibah Keluar (Kode Transaksi 303)
Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara yang berkurang di tahun berjalan karena dihibahkan ke pihak lain di luar Instansi Pemerintah Pusat. Jenis Satuan Kerja yang memakai menu ini adalah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD).
 - Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi 304)
Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya.
 - Koreksi Pencatatan (Kode Transaksi 305)
Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada perekaman sebelumnya.
 - Penghentian BMN dari Penggunaan (Kode Transaksi 401)
Menu ini digunakan mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses/langkah penghapusan BMN karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasi normal



satker yang bersangkutan.

- Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan (Kode Transaksi 402)

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan kembali setelah mendapat perbaikan, baik dengan atau tanpa biaya tambahan.

- Usulan Barang Hilang ke Pengelola (Kode Transaksi 308)

Pengusulan barang hilang ke pengelola digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang. Pada saat dilakukan input pada menu ini, BMN yang hilang (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN hilang tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Hilang.

- Usulan Barang RB (Rusak Berat) ke Pengelola (Kode Transaksi 306)

Usulan Barang RB ke Pengelola digunakan pada saat pengguna barang sudah mengajukan surat permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola Barang.

Setelah dilakukan input pada menu ini, BMN rusak berat (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN RB tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Rusak Berat.

- Penghapusan Daftar Barang RB (Rusak Berat) (Kode Transaksi 822)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang setelah fisik BMN rusak berat telah selesai dipindahtangankan atau dimusnahkan.

Setelah terbit Surat Keputusan Penghapusan Barang, maka dilakukan penginputan penghapusan barang yang sudah diusulkan dihapuskan.

- BMN Bersejarah

Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran



tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah. Barang Bersejarah tidak dicatat dalam Laporan Neraca namun dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Saldo Awal Barang Bersejarah (Kode Transaksi 601)
Menu saldo awal untuk Barang Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah sebelum tahun berjalan namun belum dilakukan pencatatan pada tahun tersebut sehingga baru dicatat pada tahun berjalan.
- Perolehan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 602)
Menu perolehan BMN Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah pada tahun berjalan.
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Penghapusan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 604)
Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara Bersejarah yang berkurang di tahun berjalan karena hancur tak berbentuk lagi atau hilang. Satker mencatat di menu ini apabila izin penghapusan telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL).
- Perolehan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 701)
Menu ini digunakan untuk mencatat aset tetap/aset lainnya berupa Barang Pihak Ketiga yang dititipkan kepada instansi atau barang pihak ketiga yang digunakan sehari-hari. Barang tersebut tidak muncul di neraca hanya muncul di daftar barang ruangan dan daftar barang pihak ketiga.
- Penghapusan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 702)
Menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga digunakan untuk menghapus barang Pihak ketiga dari Daftar Barang Pihak Ketiga dikarenakan barang tersebut tidak ada lagi, misalnya karena dikembalikan ke pemiliknya, rusak berat atau hilang.
- Saldo Awal KDP (Kode Transaksi 501)
Digunakan untuk merekam KDP yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. KDP tidak disusutkan.
- Perolehan KDP (Kode Transaksi 502)



Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan transaksi:

1. KDP yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai
 2. Perekaman SPM/SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka memperoleh aset tetap yang pembayarannya dilakukan per termin dan SPM/SP2D tersebut di tahun anggaran berjalan.
- Pengembangan KDP (Kode Transaksi 503)
Menu ini disediakan untuk menginput penambahan KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif.
 - Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Kode Transaksi 105)
Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, berasal dari aset yang telah selesai proses pembangunan melalui mekanisme KDP (telah selesai 100% pekerjaan fisiknya), dan biasanya pencairan dananya melalui beberapa termin pembayaran.
 - Transfer Masuk KDP (Kode Transaksi 506)
Menu ini digunakan untuk merekam transaksi perolehan KDP bersumber dari Satker lain pada Pemerintah Pusat. Transaksi ini hanya satu kali saja pencatatannya ketika menerima transfer masuk KDP, selanjutnya akan dicatat pada menu pengembangan KDP sampai proses KDP selesai (jika proses KDP tersebut akan dilanjutkan oleh unit penerima transfer KDP).
 - Hibah Masuk KDP (Kode Transaksi 508)
Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diperoleh dari pihak ketiga di luar Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.
 - Koreksi Perubahan Nilai KDP (Kode Transaksi 504)
Menu ini digunakan untuk menginput koreksi perubahan Nilai KDP yang sudah terinput sebelumnya.
 - Transfer Keluar KDP (Kode Transaksi 507)
Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diserahkan ke Satker lain atau Kementerian Lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer Keluar diinput ke dalam Aplikasi SAKTI Modul Aset apabila Berita Acara Serah Terima dari kedua belah pihak telah ditandatangani. Penginputan di Aplikasi SAKTI Modul Aset pada menu Transaksi KDP, Transfer



Keluar KDP.

- Hibah Keluar KDP (Kode Transaksi 509)
Menu Hibah Keluar KDP Digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat pada tahun berjalan.
- Penghapusan/Penghentian KDP (Kode Transaksi 505)
Menu ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian pembangunannya. Dokumen sumber yang digunakan adalah surat keputusan penghapusan/penghentian atas KDP.
- Barang Berlebih (Kode Transaksi 120)
Sub-submenu Barang Berlebih digunakan untuk mencatat barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dan dilaporkan pada Aplikasi SAKTI Modul Aset. Secara substansi, transaksi Barang Berlebih identik dengan transaksi Saldo Awal pada menu transaksi umum dalam Aplikasi SAKTI Modul Aset.
- Reklas Masuk Inventarisasi (Kode Transaksi 121)
Sub-submenu Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi masuk barang sehubungan dengan dilakukannya inventarisasi barang. Barang-barang yang direkam melalui ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN yaitu tanah, jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- Reklas Keluar Inventarisasi (Kode Transaksi 321)
Sub-submenu Reklasifikasi Keluar Inventarisasi digunakan untuk mencatat reklasifikasi keluar barang sehubungan dengan pelaksanaan inventarisasi. Dalam hal ini barang-barang yang dapat direkam melalui sub-submenu reklasifikasi keluar inventarisasi merupakan barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN tahun 2017 dan 2022, yaitu barang berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015.
- Tidak Ditemukan (Kode Transaksi 221)
Sub-submenu Barang Tidak Ditemukan digunakan untuk merekam barang yang selama ini tercatat dalam Aplikasi SAKTI Modul Aset, namun dalam pelaksanaan Inventarisasi, barang tersebut secara fisik tidak ditemukan keberadaannya. Perekaman transaksi barang tidak ditemukan tidak serta merta menghapus BMN dari pencatatan karena bertujuan untuk mengidentifikasi BMN yang tidak ditemukan fisiknya. Dengan demikian atas pencatatan barang tidak ditemukan tidak akan



- terbentuk jurnal, tidak akan terdapat perubahan kuantitas barang, dan tidak terdapat perubahan nilai barang.
- Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (Kode Transaksi 222)
Menu ini digunakan untuk pencatatan perubahan kuantitas barang-barang sebagai hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali. Barang-barang yang dapat direkam pada menu ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang secara karakteristik dapat berubah kuantitasnya karena satu dan lain hal. Dengan demikian barang yang dapat direkam dalam menu ini adalah barang berupa Tanah (kode 2.xx.xx.xx.xxx), Jalan (kode 5.01.01.xx.xxx), dan jembatan (kode 5.01.02.xx.xxx) yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
 - Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (Kode Transaksi 205)
Pencatatan hasil penilaian kembali BMN (revaluasi) dilakukan melalui submenu Koreksi Penilaian Kembali (kode transaksi 205). Nilai baru yang diinput dalam transaksi Koreksi Penilaian Kembali adalah nilai wajar hasil revaluasi yang tertuang dalam dokumen LHIP. Barang yang menjadi objek Penilaian Kembali BMN pada tahun 2017 dan 2022 adalah Tanah, Jalan dan Jembatan, Gedung dan Bangunan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015. Penggunaan submenu Penilaian Kembali BMN (Kode Transaksi 205) tidak terbatas pada barang-barang yang menjadi objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN namun juga dimungkinkan untuk perekaman hasil penilaian kembali BMN selain objek penilaian kembali tahun 2017 dan 2022, sepanjang Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang



telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jauh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan



untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70



- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

8. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai 31 Desember 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada 31 Desember 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja prioritas dalam rangka pelaksanaan rencana kerja nyata pemerintahan, adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan serta dengan diterimanya Hibah Langsung berupa uang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2023

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	349,966,950,000	349,966,950,000
Jumlah Pendapatan	349,966,950,000	349,966,950,000
Belanja		
Belanja Pegawai	98,857,959,000	21,633,656,000
Belanja Barang	90,252,982,000	95,064,804,000
Belanja Modal	4,425,471,000	13,573,934,000
Jumlah Belanja	193,536,412,000	208,968,207,000

*Realisasi Pendapatan
(Netto) Rp.
1,106,765,698,761,00*

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan (netto) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1,106,765,698,761,00 atau mencapai 316 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 349,966,950,000,00.

Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Jenis pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta antara lain:

- Pendapatan lain-lain berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai



Tahun Anggaran Yang Lalu;
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0,00	228,056,525	0,00
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	349,966,950,000	1,106,488,000,003	316.16
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	0,00	12,320,000	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	61,922,233	0,00
	Jumlah Pendapatan	349,966,950,000	1,106,765,698,761	316,25

Adapun estimasi dan realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023

MAP	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	00,00	228,056,525	0,00
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	0,00	12,320,000	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	61,922,233	0,00
	Jumlah	0,00	301,298,758	0,00

Berikut adalah perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 :

Tabel 8
Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023

31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	%



1,106,765,698,761	718,846,619,317	387,919,079,444	53,96
-------------------	-----------------	-----------------	-------

Berdasarkan Tabel 8 di atas, realisasi PNBPN per 31 Desember 2023 lebih tinggi sebesar Rp. 387,919,079,444,00 atau 54 % dibandingkan per 31 Desember 2022.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	14,234,933	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	47,687,300	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	61,922,233	0,00

Realisasi Belanja (Netto)
Rp 206,763,278,023,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja (netto) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 206,763,278,023 atau 99 % dari anggaran belanja sebesar Rp 208,968,207,000,00.

Sepanjang Tahun Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melakukan beberapa kali proses revisi sesuai ketentuan. Revisi dilakukan karena perubahan kegiatan sesuai kebutuhan Satuan Kerja maupun karena peraturan terkait Penghematan dan lain-lain.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 lebih tinggi sebesar Rp. 3,134,881,011 atau sebesar 1,53 % dibandingkan 31 Desember 2022. Perbandingan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023

31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
Rp	Rp	Rp	%
206,763,278,023	203,628,397,012	3,134,881,011	1,53

Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daftar Isian



Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 menurut jenis belanja :

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	100,329,469,000	99,596,489,034	99
Belanja Barang	95,064,804,000	93,711,441,721	99
Belanja Modal	13,573,934,000	13,455,347,268	99
Total	208,968,207,000	206,763,278,023	99

*Realisasi Belanja
Pegawai Rp
99,596,489,034,00*

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.99,596,489,034,00 atau 99 % dari pagu sebesar Rp 100,329,469,000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.96,587,760,900,00 atau 100 % dari pagu sebesar Rp 96,921,298,000,00

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut adalah Tabel Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 menurut jenis belanja pegawai :

Tabel 12
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	67,755,131,000	67,413,868,720	3,581,100	67,410,287,620	99.49
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,355,000	1,332,691	1,529	1,331,162	98.24
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,224,034,000	4,205,616,128	0	4,205,616,128	99.56
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,130,895,000	1,123,530,550	0	1,123,530,550	99.35
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,038,440,000	1,024,875,000	0	1,024,875,000	98.69
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,868,295,000	5,847,500,000	1,320,000	5,846,180,000	99.62
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	37,352,000	35,867,314	0	35,867,314	96.03
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,855,097,000	3,837,028,860	0	3,837,028,860	99.53
511129	Belanja Uang Makan PNS	13,489,451,000	13,266,050,000	0	13,266,050,000	98.34



511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,879,688,000	1,866,027,500	2,220,100	1,863,807,400	99.16
512211	Belanja Uang Lembur	1,049,731,000	981,915,000	0	981,915,000	93.54
Jumlah		100,329,469,000	99,603,611,763	7,122,729	99,596,489,034	99.28

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
(Rp)	(Rp)	Rp	%
99,596,489,034	96,587,760,900	3,008,728,134	3,12

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 lebih tinggi sebesar Rp. 3,008,728,134,00 atau sebesar 3,12 % dibandingkan 31 Desember 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai yang berakhir sampai 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,12 persen dibandingkan realisasi belanja pada periode 31 Desember 2022. Kenaikan ini terjadi antara lain karena adanya kenaikan belanja pegawai disebabkan adanya kenaikan jumlah pegawai baru melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil maupun mutasi pegawai dilingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang Rp
93,711,441,721,00*

Realisasi Belanja Barang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 93,711,441,721,00 atau 99% dari pagu sebesar Rp 95,064,804,000,00. Realisasi belanja barang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 100,382,015,994,00 atau mencapai 98 % dari anggarannya sebesar Rp 102,809,252,000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
(Rp)	(Rp)	Rp	%
93,711,441,721	100,382,015,994	(6,670,574,273)	0,07

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 lebih rendah sebesar Rp.6,670,574,273,00 atau sebesar 0,07 % dibandingkan 31 Desember 2022.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 15
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	25,106,935,000	25,015,614,101	0	25,015,614,101	99.64
5212	Belanja Barang Non Operasional	25,112,408,000	24,846,233,585	0	24,846,233,585	98.94
5218	Belanja Barang Persediaan	8,921,773,000	8,901,320,278	0	8,901,320,278	99.77
5221	Belanja Jasa	12,289,987,000	12,114,371,641	0	12,114,371,641	98.57
5231	Belanja Pemeliharaan	13,275,438,000	13,055,888,383	0	13,055,888,383	98.35
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10,358,263,000	9,919,838,887	141,825,154	9,778,013,733	95.77
Jumlah		95,064,804,000	93,853,266,875	141,825,154	93,711,441,721	98.73

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	21,633,656,000	21,589,610,117	0	21,589,610,117	99.8
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,159,075,000	1,153,014,838	0	1,153,014,838	99.48
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,997,000	4,783,900	0	4,783,900	68.37
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,550,550,000	1,541,658,000	0	1,541,658,000	99.43
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	155,975,000	139,000,340	0	139,000,340	89.12
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	600,682,000	587,546,906	0	587,546,906	97.81
Jumlah		25,106,935,000	25,015,614,101	0	25,015,614,101	99.64

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521211	Belanja Bahan	12,557,766,000	12,410,978,144	0	12,410,978,144	98.83
521213	Belanja Honor Output	429,277,000	424,240,000	0	424,240,000	98.83
521219	Belanja Barang Non Operasional	12,125,365,000	12,011,015,441	0	4,936,449,122	99.06
Jumlah		25,112,408,000	24,846,233,585	0	24,846,233,585	98.94



Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,866,384,000	8,845,933,609	0	8,845,933,609	99.77
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	55,389,000	55,386,669	0	55,386,669	100
Jumlah		8,921,773,000	8,901,320,278	0	8,901,320,278	99.77

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
522111	Belanja Langganan Listrik	6,988,915,000	6,898,831,477	0	6,898,831,477	98.71
522112	Belanja Langganan Telepon	74,876,000	59,116,185	0	59,116,185	78.95
522113	Belanja Langganan Air	296,118,000	282,352,295	0	282,352,295	95.35
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0	0	0
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	0	0	0	0
522141	Belanja Sewa	4,140,759,000	4,114,687,684	0	4,114,687,684	99.37
522151	Belanja Jasa Profesi	238,014,000	222,200,000	0	222,200,000	93.36
522191	Belanja Jasa Lainnya	490,480,000	476,359,000	0	476,359,000	97.12
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	60,825,000	60,825,000	0	60,825,000	100
Jumlah		12,289,987,000	12,114,371,641	0	12,114,371,641	98.57

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,351,853,000	5,309,463,659	0	5,309,463,659	99.21
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	416,042,000	414,533,550	0	414,533,550	99.64



523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,479,850,000	7,308,802,774	0	7,308,802,774	97.71
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	27,693,000	23,088,400	0	23,088,400	83.37
Jumlah		13,275,438,000	13,055,888,383	0	13,055,888,383	98.35

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6,180,095,000	5,812,975,637	42,388,848	5,770,586,789	93.37
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,883,925,000	1,758,195,750	5,306,350	1,752,889,400	93.04
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,576,381,000	1,541,444,000	0	1,541,444,000	97.78
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	717,862,000	807,223,500	94,129,956	713,093,544	99.34
Jumlah		10,358,263,000	9,919,838,887	141,825,154	9,778,013,733	95.77

Belanja Modal Rp
13,455,347,268,00

B.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 13,455,347,268,00 atau 99 % dari pagu Rp 13,573,934,000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 22
Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,303,934,000	12,197,090,500	0	12,197,090,500	99.13
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,270,000,000	1,258,256,768	0	1,258,256,768	99.08
Jumlah		13,573,934,000	13,455,347,268	0	13,455,347,268	99.13



Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,303,934,000	12,197,090,500	0	12,197,090,500	99.13
Jumlah		12,303,934,000	12,197,090,500	0	12,197,090,500	99.13

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
533121	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,270,000,000	1,258,256,768	0	1,258,256,768	99.08
Jumlah		1,270,000,000	1,258,256,768	0	1,258,256,768	99.08



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan

Rp.41,399,480,363,00

C.1. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 41,399,480,363,00 dan Rp 28,481,704,376,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25
Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	41,127,853,077	28,080,061,703
Bahan Untuk Pemeliharaan	271,627,286	401,642,673
Jumlah	41,399,480,363	28,481,704,376

Tanah Rp

405,976,599,690,00

C.3. TANAH

Tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.405,976,599,690,00 dan Rp.354,884,526,690,00. Rincian perbandingan nilai Aset Tanah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 .

Rincian Mutasi Tanah tersebut meliputi :

Tabel 26
Rincian Mutasi Tanah

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2022	354,884,526,690.
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	0,00
Transfer Masuk	51.092.073.000
Total Mutasi Tambah :	0,00
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	0,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Total Mutasi Kurang :	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	354,884,526,690.
Nilai Buku per 31 Desember 2023	405,976,599,690.



Peralatan dan Mesin **C.4. PERALATAN DAN MESIN**
Rp. 215,735,943,285,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.215,735,943,285,00 dan Rp.228,199,504,919,00.

Rincian mutasi peralatan dan mesin meliputi:

Tabel 27
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 30 Desember 2022	228,199,504,919
Mutasi tambah :	
Pembelian	12.197.090.500
Transfer Masuk	11.355.385.055
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	4.373.761.041
Total Mutasi Tambah :	27.926.236.596
Mutasi Kurang :	
Transfer Keluar	1.851.096.050
Total Mutasi Kurang :	1.851.096.050
Saldo per 31 Desember 2023	215,735,943,285
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(188,638,733,739)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	27.097.209.546

Gedung dan Bangunan **C.5. GEDUNG DAN BANGUNAN**
Rp. 156,783,553,223,00

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.156,783,553,223,00 dan Rp. 150,979,877,954,00. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan tersebut meliputi :

Tabel 28
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 30 Desember 2022	150,979,877,954
Mutasi tambah :	
Pengembangan Nilai Aset	907,251,458
Total Mutasi Tambah :	907,251,458
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2023	156,783,553,223



Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	28,388,886,647
Nilai Buku per 31 Desember 2023	128.394.666.576

C.6. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap (Rp
55,575,629,487)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp 55,575,629,487) dan (Rp 25,389,314,265). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Tabel 29
Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	215,735,943,285	188,638,733,739	27.097.209.546
2	Gedung dan Bangunan	156,783,553,223	28,388,886,647	128.394.666.576
	Jumlah	372.519.496.508	217.027.620.386	155.491.876.122

C.7. ASET TAK BERWUJUD

*Aset Tak Berwujud
Rp. 1,877,844,403,00*

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 1,877,844,403,00 dan Rp. 2,109,399,883,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Nilai
1	Software	1,877,844,403
	Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1,877,844,403

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Tabel 31
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2022	1,877,844,403
Mutasi tambah :	
Transfer Masuk	



Total Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	
Total Mutasi Kurang :	
Saldo per 31 Desember 2023	1,877,844,403
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1,877,844,403

Aset Lain-Lain Rp
54,020,755,429,00

C.8. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.54,020,755,429,00 dan Rp. 23,477,894,829,00.

Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan. Rincian Aset Lain-Lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32

Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	53,588,424,179	22,258,190,215
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	432,331,250	1,219,704,614
Total	54,020,755,429	23,477,894,829

Aset Tetap Yang Tidak
Digunakan Dalam
Operasional
Pemerintahan
Rp.53,588,424,179,00

C.8.1. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN

Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 53,588,424,179,00 dan Rp.22,258,190,215,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan tersebut meliputi :

Tabel 33

Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2022	22,258,190,215



Mutasi tambah :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	
Total Mutasi Tambah :	0.
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	4.347.421.041
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	35.221.776.907
Total Mutasi Kurang :	39.569.197.948
Saldo per 31 Desember 2023	53,588,424,179
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	53,385,819,459
Nilai Buku per 31 Desember 2023	202.604.720

C.9. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp.55,575,629,487)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp. 55,575,629,487) dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp.25,389,314,265). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 34

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud (ATB)			
1	Software		1,757,478,778	
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam pemerintahan		432,331,250	
	Jumlah		2.189.810.028	
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	53,588,424,179	53,385,819,459	202.604.720
	Jumlah		53,385,819,459	
	Grand Total		55.575.629.487	

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.817,408,157,00,-

C.11. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 817,408,157,- dan Rp. 218,307,283,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pendapatan Diterima Dimuka Rp 12,951,736,300,-

C.12. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



sebesar Rp. 12,951,736,300,- dan Rp 1,351,449,051,-. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan PNBK yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Ekuitas

Rp 599,705,597,234,-

C.13. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 599,705,597,234,- dan Rp. 539,069,605,314,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp 1,096,078,214,135,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Basis akrual akuntansi Pendapatan-LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya hak atas pendapatan terjadi, tanpa memerhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berasal dari:

- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Warga Binaan Masyarakat;
- Pendapatan Pemanfaatan dan Pengelolaan BMN, mis: Sewa Rumah Dinas, Sewa Lahan untuk ATM, Kantin dan lain-lain;
- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian;
- Pendapatan Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
- Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual;
- Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan BPSDM;
- Pendapatan Jasa Lainnya dan Jasa Giro;
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Lainnya;
- Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,096,078,214,135,00 dan Rp. 721,684,812,520,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	400,014,132	473,195,852	



425211	Pendapatan Paspor	477.316.900.000	279.961.050.000	
425212	Pendapatan Visa	379.080.500.000	223.744.500.000	
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	204.624.000.000	179.493.700.000	
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	34.656.800.003	38.004.000.001	
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		8.366.667	
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0		
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu			
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		0	
	Total	1.096.078.214.135	721.684.812.520	

Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan PNBP-LO	Pendapatan PNBP-LRA	Selisih
1,096,078,214,135	1,106,765,698,761	10.687.484.626

Rincian selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Selisih PNBP-LO dan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	400,014,132	228,056,525	171.957.607
Pendapatan Paspor	477.316.900.000	489,002,100,000	11.685.200.000
Pendapatan Visa	379.080.500.000	379.080.500.000	0
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	204.624.000.000	204.624.000.000	0
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	34.656.800.003	33,756,800,003	900.000.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	0	12,320,000	12,320,000



Pemerintah			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		14,234,933	14,234,933
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		47,687,300	47,687,300
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	12,320,000	12,320,000
Total	1,096,078,214,135	1,106,765,698,761	10.687.484.626

Penjelasan selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Penjelasan Selisih Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Selisih	Keterangan
Pendapatan Sewa dan Pelayanan Keimigrasian	10.687.484.626	Pencatatan Akrual
Total	10.687.484.626	

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa selisih antara Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA sebesar Rp. 10.687.484.626,00 disebabkan oleh adanya faktor yang menambah Pendapatan PNBP-LO tahun berjalan dan faktor yang mengurangi Pendapatan PNBP-LO karena secara akuntansi akrual transaksi tersebut merupakan pendapatan operasional tahun anggaran yang lalu.

Rekapitulasi selisih dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39
Rekapitulasi Selisih Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Faktor Yang Menambah Pendapatan PNBP-LO Tahun Berjalan	
Pendapatan PNBP-LO Tahun Berjalan atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka	10.687.484.626
A Sub Total	10.687.484.626
B Pendapatan Yang Membentuk Pendapatan Kegiatan Non Operasional	
TOTAL (A + B)	10.687.484.626

Penjelasan Selisih Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA berdasarkan Analisa Hubungan antar Laporan terdapat pada Lampiran CaLK Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Beban Pegawai Rp
99,572,777,034,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negara Sipil (PNS), dan



pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Beban Pegawai-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 99,572,777,034,00 dan Rp. 96,419,045,900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40
Perbandingan Beban Pegawai-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	67.410.287.620	64.768.925.664	0,04
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.331.162	1.143.818	0,16
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4.205.616.128	4.111.954.302	0,02
511122	Beban Tunj. Anak PNS	1.123.530.550	1.059.335.152	0,06
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.024.875.000	1.027.475.000	0,00
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5.846.180.000	5.539.520.000	0,06
511125	Beban Tunj. PPh PNS	35.867.314	37.180.984	0,04
511126	Beban Tunj. Beras PNS	3.837.028.860	3.709.279.980	0,03
511129	Beban Uang Makan PNS	13.242.338.000	13.577.481.000	0,02
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1.863.807.400	1.823.065.000	0,02
512211	Beban Uang Lembur	981.915.000	763.685.000	0,29
	Total	99.572.777.034	96.419.045.900	0,03

Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban Pegawai-LO	Belanja Pegawai-LRA	Selisih
99.572.777.034	99.596.489.034	23.712.000

Rincian selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Beban Pegawai-LO	Blj. Pegawai-LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	67.410.287.620	67.410.287.620	0
Beban Pembulatan	1.331.162	1.331.162	0



Gaji PNS			
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	4.205.616.128	4,205,616,128	0
Beban Tunjangan Anak PNS	1.123.530.550	1,123,530,550	0
Beban Tunjangan Struktural PNS	1.024.875.000	1.024.875.000	0
Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.846.180.000	5,846,180,000	0
Beban Tunjangan PPh PNS	35.867.314	35,867,314	0
Beban Tunjangan Beras PNS	3.837.028.860	3,837,028,860	0
Beban Uang Makan PNS	13.242.338.000	13,266,050,000	(23.712.000)
Beban Tunjangan Umum PNS	1.863.807.400	1,863,807,400	0
Beban Uang Lembur	981.915.000	981,915,000	0
Total	99.572.777.034	99,596,489,034	23.712.000

Selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 43
Penjelasan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Selisih	Keterangan
Belanja Uang Makan PNS	23.712.000	Pencatatan Akrual (Belanja yang Masih Harus dibayar)
Total		

Perhitungan selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA berdasarkan Analisa Hubungan antar Laporan dapat dijelaskan secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 44
Perhitungan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

A	Beban Pegawai-LO	99.572.777.034
B	Belanja Pegawai-LRA	99,596,489,034
C	Selisih Antara LO dan LRA	23.712.000
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL	
	Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan	
D	TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	23.712.000
	Selisih (c - d)	0



Beban Persediaan Rp.
124,576,226,697,-

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 124,576,226,697,00 dan Rp. 86,850,031,516,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Perbandingan Beban Persediaan-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
593111	Beban Persediaan konsumsi	124,576,226,697	86,850,031,516	43,48
	Total	124,576,226,697	86,850,031,516	43,48

Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban Persediaan-LO	Belanja Persediaan-LRA	Selisih
124,576,226,697	8,901,320,278	115.674.906.419

Perhitungan selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 47
Perhitungan Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban Persediaan LO	124,576,226,697
Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)	8,901,320,278
Selisih Antara LO dan LRA	115.674.906.419
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Persediaan Awal	
Persediaan Akhir	
Kenaikan/Penurunan Persediaan	
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	
Belanja Barang Persediaan Akun 523xxx	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
Beban Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	



FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Transfer Keluar Barang Persediaan	
Transfer Masuk Barang Persediaan	
Koreksi Nilai Persediaan (Tambah)	
Beban Penyesuain Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Total Beban Persediaan	115.674.906.419
Selisih	0

Beban Barang dan Jasa
Rp 66,396,094,788,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 66,396,094,788,00 dan Rp. 67,404,422,928,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48
Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	21.589.556.617,	22.331.596.712,	-0,03
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.153.014.838,	1.831.794.178,	-0,37
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.783.900,	13.708.786,	-0,65
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.541.658.000,	1.537.120.000,	0,00
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	143.041.340,	122.542.383,	0,17
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	587.546.906,	1.788.222.560,	-0,67
521211	Beban Bahan	12.410.978.144,	11.263.436.273,	0,10
521213	Beban Honor Output Kegiatan	424.240.000,	408.237.000,	0,04
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11.988.640.841,	11.505.830.543,	0,04
522111	Beban Langganan Listrik	6.842.130.812,	5.967.802.760,	0,15
522112	Beban Langganan Telepon	55.129.371,	75.162.125,	-0,27
522113	Beban Langganan Air	220.019.548,	252.576.793,	-0,13



522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8.675.970.471,	9.601.478.315,	-0,10
522141	Beban Sewa	222.200.000,	177.500.000,	0,25
522151	Beban Jasa Profesi	476.359.000,	125.400.000,	2,80
522191	Beban Jasa Lainnya	60.825.000,	402.014.500,	-0,85
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	220.019.548,	252.576.793,	-0,01
	Total	66.396.094.788	67.404.422.928	-0,13

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Perbandingan Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban Barang Jasa - LO	Belanja Barang – LRA	Selisih
66.396.094.788	70.877.539.605	4.438.262.561

Rincian selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Beban Barang dan Jasa-LO	Belanja Barang LRA	Selisih
Belanja Keperluan Perkantoran	21.589.556.617,	21,589,610,117	
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.153.014.838,	1,153,014,838	
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.783.900,	4.783.900,	
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.541.658.000,	1.541.658.000,	
Belanja Barang Operasional Lainnya	143.041.340,	143.041.340,	
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	587.546.906,	587.546.906,	
Belanja Bahan	12.410.978.144,	12.410.978.144,	
Belanja Honor Output Kegiatan	424.240.000,	424.240.000,	
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.988.640.841,	11.988.640.841,	
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	8,845,933,609	8,845,933,609
Belanja Barang	0	55,386,669	55,386,669



Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-			
Belanja Langganan Listrik	6.842.130.812,	6,898,831,477,	- 56.700.665
Belanja Langganan Telepon	55.129.371,	59,116,185	- 3.986.814
Belanja Langganan Air	220.019.548,	282,352,295,	- 62.332.747
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	-
Belanja Sewa	8.675.970.471	4,114,687,684,	4.561.282.787
Belanja Jasa Profesi	222.200.000,	222.200.000,	
Belanja Jasa Lainnya	476.359.000,	476.359.000,	
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	60.825.000,	60.825.000,	0
Pengembalian Beban Bahan			
Pengembalian Beban Jasa Profesi			
Total	66.396.094.788	70.877.539.605	4.438.262.561

Tabel 51
Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa - LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Selisih	Keterangan
Belanja Bahan	NIHIL	Terdapat Belanja yang belum diterima tagihannya namun bebannya sudah tercatat secara Akrual.
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	NIHIL	
Belanja Langganan Listrik	ADA	
Belanja Langganan Telepon	ADA	
Belanja Langganan Air	ADA	
Belanja Sewa	ADA	
Belanja Jasa Profesi	NIHIL	
Total	4.438.262.561	

Perhitungan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 52
Perhitungan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban Barang dan Jasa LO	66.396.094.788
Belanja Barang dan Jasa LRA	70.877.539.605
Selisih Antara LO dan LRA	4.438.262.561



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL	0
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan	4.438.262.561
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis	
Beban yang membentuk Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO	
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun menggunakan Akun Non Persediaan	
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang membentuk Aset	
Jurnal Manual Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	
Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	
Beban Ekstrakomptable	
Jurnal Pencatatan Piutang PNBPN atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja BAMA (52xxxx)	
Jurnal Pencatatan Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang	
Hibah Barang Persediaan	
Total Beban Barang dan Jasa	4.438.262.561
Selisih	0,00

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang khusus pembentuk Belanja Barang dan Jasa-LRA sebesar (Rp0,00) .

Beban Pemeliharaan
Rp. 13,148,461,680,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 13,148,461,680,- dan Rp 12,976,032,439,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 53
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,309,463,659	5,389,061,723	-0,01



523112	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan			0
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan			0
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,308,802,774	7,186,330,578	0,02
523123	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	0		0
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	530,195,247	400,640,138	0,32
	Total	13.148.461.680	12.976.032.439	0,01

Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 54
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
13.148.461.680	13,055,888,383	92.573.297

Rincian selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,309,463,659	5,309,463,659	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	0	414,533,550	(414,533,550)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,308,802,774	7,308,802,774	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	0	23,088,400	(23,088,400)
Beban Persediaan bahan untuk	530,195,247		530,195,247



pemeliharaan			
Total	13.148.461.680	13,055,888,383	92.573.297

Penjelasan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Selisih	Keterangan
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.573.297	Perhitungan Secara Akrua
Total		

Perhitungan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 57
Perhitungan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

a	Beban Pemeliharaan-LO	13.148.461.680
b	Belanja Pemeliharaan-LRA (Akun 523xxx)	13,055,888,383
c	Selisih LO dengan LRA	92.573.297
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
d	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	92.573.297
e	Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan-LO (e + f + g)	
f	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	
g	Belanja Akun Pemeliharaan yang membentuk Beban Persediaan-LO	
h	TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (d + h)	92.573.297
	Selisih (c - o)	0,00

Beban Perjalanan Dinas D.6 Beban Perjalanan Dinas
Rp 9,778,013,733,-

Beban Perjalanan Dinas-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 9,778,013,733,- dan Rp. 6,169,493,749,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
524111	Beban Perjalanan	5.770.586.789	3.025.376.349	0,91



	Biasa			
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.752.889.400	1.359.637.400	0,29
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.541.444.000	1.158.174.000	0,33
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		0	
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	713.093.544	626.306.000	0,14
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	0	
	Total	9,778,013,733	6,169,493,749	0,58

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban Perjadi-LO	Belanja Perjadi-LRA	Selisih
9,778,013,733	9,778,013,733	0

Rincian selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 60
Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Beban Perjadi-LO	Belanja Perjadi-LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	5.770.586.789	5.770.586.789	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.752.889.400	1.752.889.400	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.541.444.000	1.541.444.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	713.093.544	713.093.544	0
Total	9,778,013,733	9,778,013,733	0

Perhitungan selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 61
Perhitungan Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



a	Beban Perjalanan Dinas –LO	9,778,013,733
b	Belanja Perjalanan Dinas –LRA	9,778,013,733
c	Selisih LO dengan LRA	0
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		
d	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0
e	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0
g	TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (d + e + f)	0
	Selisih	0

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp. 0,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 13,049,976,240,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13,049,976,240,00 dan Rp. 13,968,528,520,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan	8.960.988.711,	10.078.324.346,	(0,11)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan	4.019.734.095,	3.823.148.061,	0,05
592115	Beban Amortisasi Software	48.146.250,	57.041.415,	(0,16)
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opr. Pemerintah	21.107.184,	10.014.698,	1,11
	Total	13.049.976.240,	13.968.528.520,	(0,07)

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 63
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pd Neraca	Selisih
13.049.976.240	13.049.976.240	0



Rincian selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

A	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	13.049.976.240
a	Akumulasi Penyusutan Awal	
b	Akumulasi Penyusutan Akhir	
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
c	Akumulasi Penyusutan --- Transfer Masuk	
d	Akumulasi Penyusutan --- Koreksi Tambah	
e	Akumulasi Penyusutan – Reklas Masuk	
B	Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk) (c + d + e)	
f	Akumulasi Amortisasi --- Transfer Keluar	
g	Akumulasi Penyusutan --- Koreksi Kurang	
h	Akumulasi Penyusutan --- Reklas Keluar	
i	Akumulasi Penyusutan – Penghapusan Aset	
C	Akum. Peny. Transaksional (Keluar) (f + g + h + i)	
D	TOTAL (a-b+B+C)	13.049.976.240
	Selisih (A - D)	0,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

D.8.1 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

**Beban Pelepasan Aset
Non Lancar Rp. 0,-**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Beban ini terbentuk dari Jurnal kirim SAKTI Modul Aset akibat kerugian pelepasan aset non lancar.

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	Nihil
Total	0,00	



**Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp. 61,922,233,-**

D.8.2 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kelompok pendapatan yang masuk dalam kategori Pendapatan Non Operasional Lainnya-LO adalah pendapatan yang tidak membentuk pendapatan operasional tahun berjalan karena bukan merupakan pendapatan operasional dari menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta seperti Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 61,922,233,- dan Rp 57,728,377,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
425129	Pendapatan dari Pindahtanganan BMN Lainnya	61,922,233	57,728,377	4,193,856
	Total	61,922,233	57,728,377	4,193,856

Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 67
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LRA	Selisih
61,922,233	61,922,233	0

Rincian selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	LO	LRA	Selisih
--------	----	-----	---------



Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	61,922,233	61,922,233	0,00
Total	61,922,233	61,922,233	0,00

Selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 69
Penjelasan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Selisih	Keterangan
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	NIHIL
Total		

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp. 15,992,175,-

D.8.3 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 15,992,175,- dan Rp. 23,599,200,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 70
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	15,992,175	23,599,200	7,607,025
	Total	15,992,175	23,599,200	7,607,025

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 71
Penjelasan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	Keterangan
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	15,992,175	Merupakan Penyesuaian Nilai Dokumen Imigrasi dengan harga terbaru
Total	0	



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp. 539,069,605,314,-

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 539,069,605,314,00 dan Rp 528,836,647,014,00.

Surplus (Defisit) LO
Rp. 769,618,928,021,-

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 769,618,928,021,- dan 437,918,575,045,00

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas
Rp. 3,906,641,721,-

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp. 3,906,641,721,-) dan (Rp 1,420,402,906,00).

Koreksi Nilai Persediaan
Rp 5,354,110,-

E.3.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,354,110,- dan Rp 25,665,-.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
(Rp. 3,875,667,291,-)

E.3.2. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,875,667,291,- dan Rp. 81,428,571,-

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 71
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi
per 31 Desember 2023

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	3,875,667,291
TOTAL KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	3,875,667,291

Transaksi Antar Entitas
Rp 705,076,294,380,-

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.705,076,294,380,- dan Rp. 426,265,213,839,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun antara K/L dengan BUN.

Perhitungan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 72
Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NO	TRANSAKSI	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Ditagihkan Kepada Entitas Lain	206,763,278,023	203,628,397,012
2	Diterima Dari Entitas Lain	-1,106,765,698,761	-718,846,619,317
3	Transfer Keluar	-2,465,481,856	-642,584,892
4	Transfer Masuk	197,391,608,214	87,107,793,358
	Pengesahan Hibah Langsung	0	0
	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	-705,076,294,380	-428,753,013,839

E.4.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023. DDEL sebesar (Rp 1,106,765,698,761) sedangkan DKEL sebesar Rp.206,763,278,023,-.

E.4.2. TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK

Transfer Keluar /Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA-BUN.



Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Transfer Keluar sebesar Rp 2,465,481,856,- dan Transfer Masuk sebesar Rp. 197,391,608,214,-.

Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran.

E.5. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp 599,705,597,234,-

Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing - masing sebesar Rp.599,705,597,234,- dan Rp.539,069,605,314,-.



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Terdapat Kejadian Penting setelah tanggal Neraca 31 Desember 2023 yang mempengaruhi nilai aset dan persediaan pada CaLK Semester II Tahun Anggaran 2023 yang laporannya akan diperbaiki pada Semester II Tahun 2023 Audited.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan proses restrukturisasi satuan kerja untuk menyelaraskan program dan kegiatan pada satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan program yang diemban oleh unit Eselon I terkait. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa dalam pengelolaan keuangan terdapat perubahan identitas entitas akuntansi dan penambahan satker Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Raya.

Perubahan identitas entitas akuntansi dimaksud merubah kode satuan kerja dan kode Eselon I dari semula 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 03 (Administrasi Hukum Umum) untuk UPT Administrasi Hukum Umum (Balai Harta Peninggalan), 05 (Direktorat Jenderal Masyarakatan) untuk UPT Masyarakatan (Lapas, Rutan, Bapas, Rupbasan dan Rumah Sakit Pengayoman Cipinang) dan 06 (Direktorat Jenderal Imigrasi) untuk UPT Keimigrasian (Kanim dan Rudenim). Pada Kantor Wilayah mengalami penambahan menjadi 9 (Sembilan) entitas akuntansi sesuai jumlah DIPA Petikan. Setiap entitas akuntansi kantor wilayah memiliki kode Eselon I sesuai DIPA Petikan dari Unit Eselon I dan memiliki kode satuan kerja sebagaimana ditentukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pertama kali dibentuk pada tahun 1982 dengan nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta. keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada saat itu meliputi wilayah Tangerang dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari Lembaga Masyarakatan (LAPAS) Balai Masyarakatan (BAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN). Kemudian untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Tangerang diserahkan kepada Kantor Wilayah Jawa Barat dan kemudian dibentuk pula Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: A.325.KP.04.04 Tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001.



Kepala Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh para koordinator yaitu Koordinator Administrasi, Koordinator Pemasarakatan dan Koordinator Keimigrasian. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM istilah Koordinator dirubah menjadi Divisi masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Divisi-divisi tersebut terdiri dari:

1. Divisi Administrasi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
2. Divisi Pemasarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan;
3. Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta saat ini membawahi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 4 (empat) Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), 3 (tiga) Rumah Tahanan (RUTAN), 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 4 (empat) Balai Pemasarakatan (BAPAS), 5 (lima) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), 7 (tujuh) Kantor Imigrasi (KANIM), 1 (satu) Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), 1 (satu) Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta dan 1 (satu) Rumah Sakit.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
UAPPAW : BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA 013060100KD

Tgl Data : 16/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 16/02/24 3:56 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_uappaw_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	208,968,207,000	206,763,278,023	(2,204,928,977)	99	206,508,599,000	203,628,397,012	(2,880,201,988)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.W.1

WILAYAH/PROVINSI : 013060100KD

BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tanggal : 16/02/24 3:57 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pondakun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20,834,000	0	20,834,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	207,222,525	0	207,222,525	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	228,056,525	0	228,056,525	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425211	Pendapatan Paspor	104,538,650,000	489,002,750,000	650,000	489,002,100,000	467.77
425212	Pendapatan Visa	108,878,700,000	379,080,500,000	0	379,080,500,000	348.17
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	122,754,500,000	204,647,950,000	23,950,000	204,624,000,000	166.69
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	13,795,100,000	33,756,800,003	0	33,756,800,003	244.7
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	349,966,950,000	1,106,488,000,003	24,600,000	1,106,463,400,003	316.16
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	12,320,000	0	12,320,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	12,320,000	0	12,320,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,234,933	0	14,234,933	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47,687,300	0	47,687,300	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	61,922,233	0	61,922,233	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	349,966,950,000	1,106,790,298,761	24,600,000	1,106,765,698,761	316.25
	JUMLAH PENDAPATAN	349,966,950,000	1,106,790,298,761	24,600,000	1,106,765,698,761	316.25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 013060100KD **BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/02/24 3:57 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_uappaw --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,215,745,000	600,682,000	587,546,906	0	587,546,906	97.81	13,135,094
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,215,745,000	600,682,000	587,546,906	0	587,546,906	97.81	13,135,094
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	387,500,000	55,389,000	55,386,669	0	55,386,669	100	2,331
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	387,500,000	55,389,000	55,386,669	0	55,386,669	100	2,331
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	514,434,000	60,825,000	60,825,000	0	60,825,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	514,434,000	60,825,000	60,825,000	0	60,825,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,117,679,000	716,896,000	703,758,575	0	703,758,575	98.17	13137425
	JUMLAH BELANJA	2,117,679,000	716,896,000	703,758,575	0	703,758,575	98.17	13,137,425

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 013060100KD **BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/02/24 3:57 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	65,575,099,000	67,755,131,000	67,413,868,720	3,581,100	67,410,287,620	99.49	344,843,380
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,226,000	1,355,000	1,332,691	1,529	1,331,162	98.24	23,838
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	6,293,005,000	4,224,034,000	4,205,616,128	0	4,205,616,128	99.56	18,417,872
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	967,560,000	1,130,895,000	1,123,530,550	0	1,123,530,550	99.35	7,364,450
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,031,014,000	1,038,440,000	1,024,875,000	0	1,024,875,000	98.69	13,565,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,000,192,000	5,868,295,000	5,847,500,000	1,320,000	5,846,180,000	99.62	22,115,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	19,623,000	37,352,000	35,867,314	0	35,867,314	96.03	1,484,686
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,477,839,000	3,855,097,000	3,837,028,860	0	3,837,028,860	99.53	18,068,140
511129	Belanja Uang Makan PNS	13,836,103,000	13,489,451,000	13,266,050,000	0	13,266,050,000	98.34	223,401,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,984,516,000	1,879,688,000	1,866,027,500	2,220,100	1,863,807,400	99.16	15,880,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	98,186,177,000	99,279,738,000	98,621,696,763	7,122,729	98,614,574,034	99.34	665,163,966
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	671,782,000	1,049,731,000	981,915,000	0	981,915,000	93.54	67,816,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	671,782,000	1,049,731,000	981,915,000	0	981,915,000	93.54	67,816,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	98,857,959,000	100,329,469,000	99,603,611,763	7,122,729	99,596,489,034	99.28	732979966
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	20,461,650,000	21,633,656,000	21,589,610,117	0	21,589,610,117	99.8	44,045,883
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,597,140,000	1,159,075,000	1,153,014,838	0	1,153,014,838	99.48	6,060,162
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	37,752,000	6,997,000	4,783,900	0	4,783,900	68.37	2,213,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,575,000,000	1,550,550,000	1,541,658,000	0	1,541,658,000	99.43	8,892,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	176,850,000	155,975,000	139,000,340	0	139,000,340	89.12	16,974,660
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,215,745,000	600,682,000	587,546,906	0	587,546,906	97.81	13,135,094
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	25,064,137,000	25,106,935,000	25,015,614,101	0	25,015,614,101	99.64	91,320,899
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	11,920,776,000	12,557,766,000	12,410,978,144	0	12,410,978,144	98.83	146,787,856
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	591,440,000	429,277,000	424,240,000	0	424,240,000	98.83	5,037,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,607,040,000	12,125,365,000	12,011,015,441	0	12,011,015,441	99.06	114,349,559

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 013060100KD **BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/02/24 3:57 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	25,119,256,000	25,112,408,000	24,846,233,585	0	24,846,233,585	98.94	266,174,415
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,377,221,000	8,866,384,000	8,845,933,609	0	8,845,933,609	99.77	20,450,391
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	387,500,000	55,389,000	55,386,669	0	55,386,669	100	2,331
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	8,764,721,000	8,921,773,000	8,901,320,278	0	8,901,320,278	99.77	20,452,722
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	6,412,080,000	6,988,915,000	6,898,831,477	0	6,898,831,477	98.71	90,083,523
522112	Belanja Langganan Telepon	102,180,000	74,876,000	59,116,185	0	59,116,185	78.95	15,759,815
522113	Belanja Langganan Air	418,740,000	296,118,000	282,352,295	0	282,352,295	95.35	13,765,705
522141	Belanja Sewa	4,587,982,000	4,140,759,000	4,114,687,684	0	4,114,687,684	99.37	26,071,316
522151	Belanja Jasa Profesi	400,500,000	238,014,000	222,200,000	0	222,200,000	93.36	15,814,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	429,800,000	490,480,000	476,359,000	0	476,359,000	97.12	14,121,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	514,434,000	60,825,000	60,825,000	0	60,825,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,865,716,000	12,289,987,000	12,114,371,641	0	12,114,371,641	98.57	175,615,359
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,611,208,000	5,351,853,000	5,309,463,659	0	5,309,463,659	99.21	42,389,341
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	373,958,000	416,042,000	414,533,550	0	414,533,550	99.64	1,508,450
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,427,656,000	7,479,850,000	7,308,802,774	0	7,308,802,774	97.71	171,047,226
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52,805,000	27,693,000	23,088,400	0	23,088,400	83.37	4,604,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	12,465,627,000	13,275,438,000	13,055,888,383	0	13,055,888,383	98.35	219,549,617
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,131,165,000	6,180,095,000	5,812,975,637	42,388,848	5,770,586,789	93.37	409,508,211
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,838,160,000	1,883,925,000	1,758,195,750	5,306,350	1,752,889,400	93.04	131,035,600
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	720,770,000	1,576,381,000	1,541,444,000	0	1,541,444,000	97.78	34,937,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	283,430,000	717,862,000	807,223,500	94,129,956	713,093,544	99.34	4,768,456
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	5,973,525,000	10,358,263,000	9,919,838,887	141,825,154	9,778,013,733	95.77	580,249,267
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	90,252,982,000	95,064,804,000	93,853,266,875	141,825,154	93,711,441,721	98.73	1353362279
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,425,471,000	12,303,934,000	12,197,090,500	0	12,197,090,500	99.13	106,843,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 013060100KD **BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 16/02/24 3:57 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	4,425,471,000	12,303,934,000	12,197,090,500	0	12,197,090,500	99.13	106,843,500
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,270,000,000	1,258,256,768	0	1,258,256,768	99.08	11,743,232
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	1,270,000,000	1,258,256,768	0	1,258,256,768	99.08	11,743,232
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,425,471,000	13,573,934,000	13,455,347,268	0	13,455,347,268	99.13	118586732
	JUMLAH BELANJA	193,536,412,000	208,968,207,000	206,912,225,906	148,947,883	206,763,278,023	99.02	2,204,928,977

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
UAPPAW : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 4:04 PM

Halaman : 1

lap_neraca_uappaw_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2,059,702,694	6,620,985,481	(4,561,282,787)	(68.89)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	71,488,716	0	71,488,716	0.00
Piutang Bukan Pajak	6,400,000,000	5,500,000,000	900,000,000	16.36
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(32,000,000)	(27,500,000)	(4,500,000)	16.36
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	6,368,000,000	5,472,500,000	895,500,000	16.36
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	24,000,000	12,320,000	11,680,000	94.81
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(120,000)	(61,600)	(58,400)	94.81
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	23,880,000	12,258,400	11,621,600	94.81
Persediaan	41,399,480,363	28,481,704,376	12,917,775,987	45.35
JUMLAH ASET LANCAR	49,922,551,773	40,587,448,257	9,335,103,516	23.00
ASET TETAP				
Tanah	405,976,599,690	354,884,526,690	51,092,073,000	14.40
Peralatan dan Mesin	215,735,943,285	228,199,504,919	(12,463,561,634)	(5.46)
Gedung dan Bangunan	156,783,553,223	150,979,877,954	5,803,675,269	3.84
Aset Tetap Lainnya	62,460,603	62,460,603	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	907,251,458	0	907,251,458	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(217,027,620,386)	(234,272,437,222)	17,244,816,836	(7.36)
JUMLAH ASET TETAP	562,438,187,873	499,853,932,944	62,584,254,929	12.52
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	27,000,000	0	27,000,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(135,000)	0	(135,000)	0.00
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	26,865,000	0	26,865,000	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	26,865,000	0	26,865,000	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,877,844,403	2,109,399,883	(231,555,480)	(10.98)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	764,166,700	0	764,166,700	0.00
Aset Lain-lain	54,020,755,429	23,477,894,829	30,542,860,600	130.09
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(55,575,629,487)	(25,389,314,265)	(30,186,315,222)	118.89
JUMLAH ASET LAINNYA	1,087,137,045	197,980,447	889,156,598	449.11
JUMLAH ASET	613,474,741,691	540,639,361,648	72,835,380,043	13.47
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	817,408,157	218,307,283	599,100,874	274.43

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
UAPPAW : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 4:04 PM

Halaman : 2

lap_neraca_uappaw_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Diterima Dimuka	12,951,736,300	1,351,449,051	11,600,287,249	858.36
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13,769,144,457	1,569,756,334	12,199,388,123	777.15
JUMLAH KEWAJIBAN	13,769,144,457	1,569,756,334	12,199,388,123	777.15
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	599,705,597,234	539,069,605,314	60,635,991,920	11.25
JUMLAH EKUITAS	599,705,597,234	539,069,605,314	60,635,991,920	11.25
JUMLAH EKUITAS	599,705,597,234	539,069,605,314	60,635,991,920	11.25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	613,474,741,691	540,639,361,648	72,835,380,043	13.47

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
WILAYAH/PROVINSI :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl. Cetak 16/02/2024
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	6,620,985,481	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,500,000,000	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	12,320,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	27,500,000
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	61,600
0.0	117111	Barang Konsumsi	28,080,061,703	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	401,642,673	0
0.0	131111	Tanah	354,884,526,690	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	228,199,504,919	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	150,979,877,954	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	62,460,603	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	212,016,431,055
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	22,256,006,167
0.0	162151	Software	2,109,399,883	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	22,258,190,215	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1,219,704,614	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	22,228,721,643
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,940,888,008
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1,219,704,614
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	23,712,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	194,595,283
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	340,749,051
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	1,010,700,000
0.0	391111	Ekuitas	0	539,069,605,314
JUMLAH			800,328,674,735	800,328,674,735

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 4:33 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	2,059,702,694	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	71,488,716	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,400,000,000	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	24,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	32,000,000
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan	0	120,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	41,127,853,077	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	271,627,286	0
0.0	131111	Tanah	405,976,599,690	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	215,735,943,285	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	156,783,553,223	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	62,460,603	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	907,251,458	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	188,638,733,739
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	28,388,886,647
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	27,000,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	135,000
0.0	162151	Software	1,877,844,403	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	764,166,700	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	53,588,424,179	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	432,331,250	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	53,385,819,459
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,757,478,778
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	432,331,250
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	75,616,057
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	741,792,100
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	255,836,300
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	12,695,900,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	206,763,278,023
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,106,765,698,761	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,465,481,856	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	197,391,608,214
0.0	391111	Ekuitas	0	539,069,605,314
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	5,354,110
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,875,667,291	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	36,328,540	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20,834,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	400,014,132

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 4:33 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	477,316,900,000
3.0	425212	Pendapatan Visa	0	379,080,500,000
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-	0	204,624,000,000
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	34,656,800,003
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	14,234,933
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang	0	47,687,300
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	67,410,287,620	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,331,162	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,205,616,128	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,123,530,550	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,024,875,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5,846,180,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	35,867,314	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,837,028,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	13,242,338,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,863,807,400	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	981,915,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	21,589,556,617	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1,153,014,838	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,783,900	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,541,658,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	143,041,340	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	587,546,906	0
3.0	521211	Beban Bahan	12,410,978,144	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	424,240,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11,988,640,841	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	6,842,130,812	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	55,129,371	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	220,019,548	0
3.0	522141	Beban Sewa	8,675,970,471	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	222,200,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	476,359,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	60,825,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,309,463,659	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,308,802,774	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,770,586,789	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,752,889,400	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,541,444,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 4:33 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	713,093,544	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8,960,988,711	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,019,734,095	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	48,146,250	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	21,107,184	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	124,576,226,697	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	530,195,247	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	15,992,175	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	4,500,000	0
JUMLAH			2,325,795,465,359	2,325,795,465,359

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 4:33 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	206,763,278,023
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,106,765,698,761	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20,834,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	207,222,525
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	489,002,750,000
3.0	425212	Pendapatan Visa	0	379,080,500,000
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-	0	204,647,950,000
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	33,756,800,003
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	12,320,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	14,234,933
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	47,687,300
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	67,413,868,720	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,332,691	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,205,616,128	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,123,530,550	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,024,875,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,847,500,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	35,867,314	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,837,028,860	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	13,266,050,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,866,027,500	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	981,915,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	21,589,610,117	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,153,014,838	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,783,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,541,658,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	139,000,340	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	587,546,906	0
3.0	521211	Belanja Bahan	12,410,978,144	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	424,240,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,011,015,441	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,845,933,609	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	55,386,669	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	6,898,831,477	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	59,116,185	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	282,352,295	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,114,687,684	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	222,200,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 4:33 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	476,359,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	60,825,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,309,463,659	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	414,533,550	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,308,802,774	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	23,088,400	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,812,975,637	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,758,195,750	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,541,444,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	807,223,500	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,197,090,500	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,258,256,768	0
3.1	425211	Pengembalian Pendapatan Paspor	650,000	0
3.1	425213	Pengembalian Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk	23,950,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	3,581,100
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,529
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,320,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,220,100
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	42,388,848
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	5,306,350
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	94,129,956
JUMLAH			1,313,702,524,667	1,313,702,524,667

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 3:55 PM

Halaman : 1

lap_lo_uappaw

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,096,078,214,135	721,684,812,520	374,393,401,615	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,096,078,214,135	721,684,812,520	374,393,401,615	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,096,078,214,135	721,684,812,520	374,393,401,615	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	99,572,777,034	96,419,045,900	3,153,731,134	-
Beban Persediaan	124,576,226,697	86,850,031,516	37,726,195,181	-
Beban Barang dan Jasa	66,396,094,788	67,404,422,928	(1,008,328,140)	-
Beban Pemeliharaan	13,148,461,680	12,976,032,439	172,429,241	-
Beban Perjalanan Dinas	9,778,013,733	6,169,493,749	3,608,519,984	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 3:55 PM

Halaman : 2

lap_lo_uappaw

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	13,049,976,240	13,968,528,520	(918,552,280)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4,500,000	12,811,600	(8,311,600)	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	326,526,050,172	283,800,366,652	42,725,683,520	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	769,552,163,963	437,884,445,868	331,667,718,095	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	20,834,000	0	20,834,000	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	20,834,000	0	20,834,000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	45,930,058	34,129,177	11,800,881	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	61,922,233	57,728,377	4,193,856	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15,992,175	23,599,200	(7,607,025)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	66,764,058	34,129,177	32,634,881	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	769,618,928,021	437,918,575,045	331,700,352,976	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	769,618,928,021	437,918,575,045	331,700,352,976	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (013060100KD) BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl Data : 16/02/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/02/24 3:56 PM

Halaman : 1

lap_lpe_uappaw

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	539,069,605,314	528,836,647,014	10,232,958,300	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	769,618,928,021	437,918,575,045	331,700,352,976	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,906,641,721)	(1,420,402,906)	(2,486,238,815)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5,354,110	25,665	5,328,445	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(3,875,667,291)	(81,428,571)	(3,794,238,720)	-
LAIN-LAIN	(36,328,540)	(1,339,000,000)	1,302,671,460	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(705,076,294,380)	(426,265,213,839)	(278,811,080,541)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	60,635,991,920	10,232,958,300	50,403,033,620	-
EKUITAS AKHIR	599,705,597,234	539,069,605,314	60,635,991,920	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

131111 Tanah

Tanggal : 16/02/2024 09.48.32

Halaman : 1 dari 13

Kode Lap : lap_crbm_n_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	TANAH		22,290	405,976,599,690	22,290	405,976,599,690	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	17,871	354,884,526,690	17,871	354,884,526,690	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	1	56,744,674,000	1	56,744,674,000	0	0
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	-	4,418	0	4,418	0	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(5,652,601,000)	0	(5,652,601,000)	0	0
TOTAL				405,976,599,690		405,976,599,690		0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 16/02/2024 09.48.32

Halaman : 2 dari 13

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	ALAT BESAR		18	1,865,977,868	18	1,865,977,868	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	18	1,865,977,868	18	1,865,977,868	0	0
302	ALAT ANGKUTAN		311	36,254,561,953	309	36,253,682,553	2	879,400
000	Saldo Awal TAYL	-	299	33,198,357,953	297	33,197,478,553	2	879,400
100	Saldo Awal	-	10	2,460,204,000	10	2,460,204,000	0	0
101	Pembelian	-	9	4,385,530,000	9	4,385,530,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	1	1,190,000	1	1,190,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	8	1,736,492,438	8	1,736,492,438	0	0
302	Transfer Keluar	-	(5)	(1,370,560,000)	(5)	(1,370,560,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(8)	(1,736,492,438)	(8)	(1,736,492,438)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(12)	(2,584,758,000)	(12)	(2,584,758,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(3)	(20,453,000)	(3)	(20,453,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	12	185,051,000	12	185,051,000	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		26	660,531,385	24	659,382,210	2	1,149,175
000	Saldo Awal TAYL	-	40	6,582,749,547	36	6,581,322,210	4	1,427,337
304	Reklasifikasi Keluar	-	(2)	(43,100,000)	(2)	(43,100,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(12)	(5,879,118,162)	(10)	(5,878,840,000)	(2)	(278,162)
304	ALAT PERTANIAN		18	438,243,600	15	437,146,600	3	1,097,000
000	Saldo Awal TAYL	-	23	466,944,256	19	465,190,056	4	1,754,200
304	Reklasifikasi Keluar	-	(4)	(28,043,456)	(4)	(28,043,456)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1)	(657,200)	0	0	(1)	(657,200)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		9,451	46,695,727,520	8,706	46,430,651,039	745	265,076,481

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 16/02/2024 09.48.32

Halaman : 3 dari 13

Kode Lap : lap_crbmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	-	9,743	44,118,596,375	8,866	43,838,592,458	877	280,003,917
100	Saldo Awal	-	1	900,000	0	0	1	900,000
101	Pembelian	-	668	2,585,590,500	668	2,585,590,500	0	0
102	Transfer Masuk	-	91	1,958,290,000	91	1,958,290,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	88	600,575,331	88	600,575,331	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(52)	(388,034,000)	(52)	(388,034,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(1)	(6,000,000)	(1)	(6,000,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1,087)	(2,174,190,686)	(954)	(2,158,363,250)	(133)	(15,827,436)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		1,038	11,739,646,741	975	11,710,823,391	63	28,823,350
000	Saldo Awal TAYL	-	1,112	12,296,965,492	1,049	12,268,142,142	63	28,823,350
101	Pembelian	-	11	122,677,000	11	122,677,000	0	0
102	Transfer Masuk	-	21	105,692,200	21	105,692,200	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	12	101,262,262	12	101,262,262	0	0
302	Transfer Keluar	-	(1)	(24,999,000)	(1)	(24,999,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(117)	(861,951,213)	(117)	(861,951,213)	0	0
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		330	964,232,519	207	942,966,054	123	21,266,465
000	Saldo Awal TAYL	-	561	1,011,882,219	222	963,079,554	339	48,802,665
100	Saldo Awal	-	2	1,000,000	0	0	2	1,000,000
304	Reklasifikasi Keluar	-	(15)	(20,113,500)	(15)	(20,113,500)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(218)	(28,536,200)	0	0	(218)	(28,536,200)
308	ALAT LABORATORIUM		34	366,061,900	34	366,061,900	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	33	361,248,900	33	361,248,900	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 16/02/2024 09.48.32

Halaman : 4 dari 13

Kode Lap : lap_crbmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Pembelian	-	3	44,813,000	3	44,813,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(2)	(40,000,000)	(2)	(40,000,000)	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN		119	1,813,962,800	80	1,806,407,800	39	7,555,000
000	Saldo Awal TAYL	-	155	1,968,977,662	128	1,963,636,062	27	5,341,600
100	Saldo Awal	-	24	3,100,000	0	0	24	3,100,000
304	Reklasifikasi Keluar	-	(18)	(125,262,262)	(18)	(125,262,262)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(42)	(32,852,600)	(30)	(31,966,000)	(12)	(886,600)
310	KOMPUTER		3,672	114,487,499,070	3,666	114,483,209,670	6	4,289,400
000	Saldo Awal TAYL	-	3,476	125,932,555,316	3,470	125,928,265,916	6	4,289,400
101	Pembelian	-	246	4,988,780,000	246	4,988,780,000	0	0
102	Transfer Masuk	-	66	9,291,402,855	66	9,291,402,855	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	24	1,935,431,010	24	1,935,431,010	0	0
302	Transfer Keluar	-	(21)	(455,537,050)	(21)	(455,537,050)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(23)	(1,926,175,385)	(23)	(1,926,175,385)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(164)	(26,253,766,444)	(164)	(26,253,766,444)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	68	974,808,768	68	974,808,768	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		10	285,217,100	10	285,217,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	5	255,717,100	5	255,717,100	0	0
101	Pembelian	-	9	69,700,000	9	69,700,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(4)	(40,200,000)	(4)	(40,200,000)	0	0
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		1	77,000	0	0	1	77,000
000	Saldo Awal TAYL	-	1	77,000	0	0	1	77,000

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 16/02/2024 09.48.33

Halaman : 5 dari 13

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	RAMBU - RAMBU		7	10,950,000	7	10,950,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	8	12,325,000	8	12,325,000	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1)	(1,375,000)	(1)	(1,375,000)	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA		59	486,932,100	46	483,467,100	13	3,465,000
000	Saldo Awal TAYL	-	115	505,294,100	77	498,529,100	38	6,765,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(56)	(18,362,000)	(31)	(15,062,000)	(25)	(3,300,000)
TOTAL				216,069,621,556		215,735,943,285		333,678,271

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 16/02/2024 09.48.33
Halaman : 6 dari 13
Kode Lap : lap_crbm_n_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	BANGUNAN GEDUNG		102	156,546,168,223	101	156,537,103,223	1	9,065,000
000	Saldo Awal TAYL	-	105	150,768,832,954	100	150,733,427,954	5	35,405,000
100	Saldo Awal	-	2	5,652,601,000	2	5,652,601,000	0	0
101	Pembelian	-	1	351,005,310	1	351,005,310	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	1	5,630,858,000	1	5,630,858,000	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	351,005,310	0	351,005,310	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(5)	(5,657,198,000)	(1)	(5,630,858,000)	(4)	(26,340,000)
305	Koreksi Pencatatan	-	(1)	(351,005,310)	(1)	(351,005,310)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1)	(199,931,041)	(1)	(199,931,041)	0	0
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		2	246,450,000	2	246,450,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	2	246,450,000	2	246,450,000	0	0
TOTAL				156,792,618,223		156,783,553,223		9,065,000

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 16/02/2024 09.48.33

Halaman : 7 dari 13

Kode Lap : lap_crbnm_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		570	62,460,603	570	62,460,603	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	570	62,460,603	570	62,460,603	0	0
605	TANAMAN		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	6	900,000	0	0	6	900,000
305	Koreksi Pencatatan	-	(6)	(900,000)	0	0	(6)	(900,000)
TOTAL				62,460,603		62,460,603		0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

Tanggal : 16/02/2024 09.48.33

Halaman : 8 dari 13

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		3	907,251,458	3	907,251,458	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	0	1	0	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	-	1	819,012,390	1	819,012,390	0	0
503	Pengembangan KDP	-	0	88,239,068	0	88,239,068	0	0
510	Perolehan Lainnya KDP	-	1	351,005,310	1	351,005,310	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-	0	(351,005,310)	0	(351,005,310)	0	0
TOTAL				907,251,458		907,251,458		0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

162151 Software

Tanggal : 16/02/2024 09.48.33

Halaman : 9 dari 13

Kode Lap : lap_crbtn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		763	1,877,844,403	763	1,877,844,403	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	742	2,109,399,883	742	2,109,399,883	0	0
102	Transfer Masuk	-	26	8,677,270	26	8,677,270	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(5)	(240,232,750)	(5)	(240,232,750)	0	0
TOTAL				1,877,844,403		1,877,844,403		0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 16/02/2024 09.48.33

Halaman : 10 dari 13

Kode Lap : lap_crbmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	ALAT BESAR		1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
302	ALAT ANGKUTAN		6	371,706,500	6	371,706,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	16	537,494,500	16	537,494,500	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(12)	(185,051,000)	(12)	(185,051,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	3	20,453,000	3	20,453,000	0	0
301	Penghapusan	-	(1)	(1,190,000)	(1)	(1,190,000)	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		236	11,504,819,410	234	11,504,541,248	2	278,162
000	Saldo Awal TAYL	-	224	5,625,701,248	224	5,625,701,248	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	12	5,879,118,162	10	5,878,840,000	2	278,162
304	ALAT PERTANIAN		1	657,200	0	0	1	657,200
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	1	657,200	0	0	1	657,200
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		1,433	3,844,183,721	1,242	3,815,205,745	191	28,977,976
000	Saldo Awal TAYL	-	940	4,027,499,885	878	4,013,349,345	62	14,150,540
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	1,087	2,174,190,686	954	2,158,363,250	133	15,827,436
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(594)	(2,357,506,850)	(590)	(2,356,506,850)	(4)	(1,000,000)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		353	2,165,745,449	353	2,165,745,449	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	282	1,642,400,902	282	1,642,400,902	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	117	861,951,213	117	861,951,213	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(46)	(338,606,666)	(46)	(338,606,666)	0	0
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		218	28,536,200	0	0	218	28,536,200

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 16/02/2024 09.48.33

Halaman : 11 dari 13

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	-	46	112,693,750	46	112,693,750	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	218	28,536,200	0	0	218	28,536,200
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(46)	(112,693,750)	(46)	(112,693,750)	0	0
308	ALAT LABORATORIUM		14	62,902,400	14	62,902,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	14	62,902,400	14	62,902,400	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN		54	129,793,400	42	128,906,800	12	886,600
000	Saldo Awal TAYL	-	12	96,940,800	12	96,940,800	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	42	32,852,600	30	31,966,000	12	886,600
310	KOMPUTER		785	35,321,047,996	785	35,321,047,996	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	703	10,062,489,770	703	10,062,489,770	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(68)	(974,808,768)	(68)	(974,808,768)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	164	26,253,766,444	164	26,253,766,444	0	0
392	Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	-	(1)	(10,048,500)	(1)	(10,048,500)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(13)	(10,350,950)	(13)	(10,350,950)	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	4	5,500,000	4	5,500,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(4)	(5,500,000)	(4)	(5,500,000)	0	0
318	RAMBU - RAMBU		1	1,375,000	1	1,375,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	1	1,375,000	1	1,375,000	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA		56	18,362,000	31	15,062,000	25	3,300,000
000	Saldo Awal TAYL	-	3	96,717,500	3	96,717,500	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 16/02/2024 09.48.33

Halaman : 12 dari 13

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	56	18,362,000	31	15,062,000	25	3,300,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(3)	(96,717,500)	(3)	(96,717,500)	0	0
401	BANGUNAN GEDUNG		1	199,931,041	1	199,931,041	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	1	199,931,041	1	199,931,041	0	0
TOTAL				53,651,060,317		53,588,424,179		62,636,138

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAPPAW : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tanggal : 16/02/2024 09.48.33

Halaman : 13 dari 13

166113 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		8	432,331,250	8	432,331,250	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	49	1,219,704,614	49	1,219,704,614	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	5	240,232,750	5	240,232,750	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(46)	(1,027,606,114)	(46)	(1,027,606,114)	0	0
TOTAL				432,331,250		432,331,250		0

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
 TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB W : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tgl.Data : 16/02/24 12:00 PM

Tanggal : 16/02/24 4:35 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	41,127,853,077
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	271,627,286
131111	Tanah	405,976,599,690
132111	Peralatan dan Mesin	215,735,943,285
133111	Gedung dan Bangunan	156,783,553,223
135121	Aset Tetap Lainnya	62,460,603
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	907,251,458
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(188,638,733,739)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(28,388,886,647)
162151	Software	1,877,844,403
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	53,588,424,179
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	432,331,250
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(53,385,819,459)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,757,478,778)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(432,331,250)
J U M L A H		604,160,638,581

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT WILAYAH
 POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL)
 TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB W : 013060100KD BA(013) ES1(06) DKI JAKARTA

Tanggal : 16/02/24 4:36 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_uappaw

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	28,080,061,703
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	401,642,673
131111	Tanah	354,884,526,690
132111	Peralatan dan Mesin	228,199,504,919
133111	Gedung dan Bangunan	150,979,877,954
135121	Aset Tetap Lainnya	62,460,603
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(212,016,431,055)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(22,256,006,167)
162151	Software	2,109,399,883
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	22,258,190,215
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,219,704,614
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(22,228,721,643)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,940,888,008)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(1,219,704,614)
J U M L A H		528,533,617,767